

PENGARUH VARIABEL PDRBHK_M, TPT, DAN KURS TERHADAP VARIABEL JUMLAH PENDUDUK MISKIN MELALUI VARIABEL MEDIASI PENERIMAAN DI SUMATRA UTARA TAHUN 2001-2024

**Cornelia Aginta Br Sembiring¹, Maya Sentia Anjelika Tampubolon²,
Melisa Patrisia Manurung³, Fahmi Apriyansyah Siregar⁴,
Joko Suharianto⁵**

Ilmu Ekonomi/Fakultas Ekonomi/Universitas Negeri Medan¹⁻⁵

Email: agintacornellia@gmail.com¹, tampubolonmaya67@gmail.com²,
melisapatrisia2@gmail.com³,
fahmiapriyansyah.7233240022@mhs.unimed.ac.id⁴,
djoko@unimed.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Harga Konstan (PDRBHK_M), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan nilai tukar (Kurs) terhadap jumlah penduduk miskin (JPM) di Provinsi Sumatera Utara dengan penerimaan pemerintah sebagai variabel mediasi selama 2001–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis jalur (path analysis) melalui EViews 13 dan data sekunder dari BPS Sumatera Utara. Hasil menunjukkan bahwa PDRBHK_M, TPT, dan Kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pemerintah maupun jumlah penduduk miskin, dan penerimaan pemerintah sebagai mediasi juga tidak signifikan. Arah hubungan menunjukkan PDRBHK_M cenderung menurunkan kemiskinan, sedangkan pelemahan Kurs cenderung meningkatkannya.

Kata kunci: PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka, Kurs, Penerimaan Pemerintah, Jumlah Penduduk Miskin

Abstract

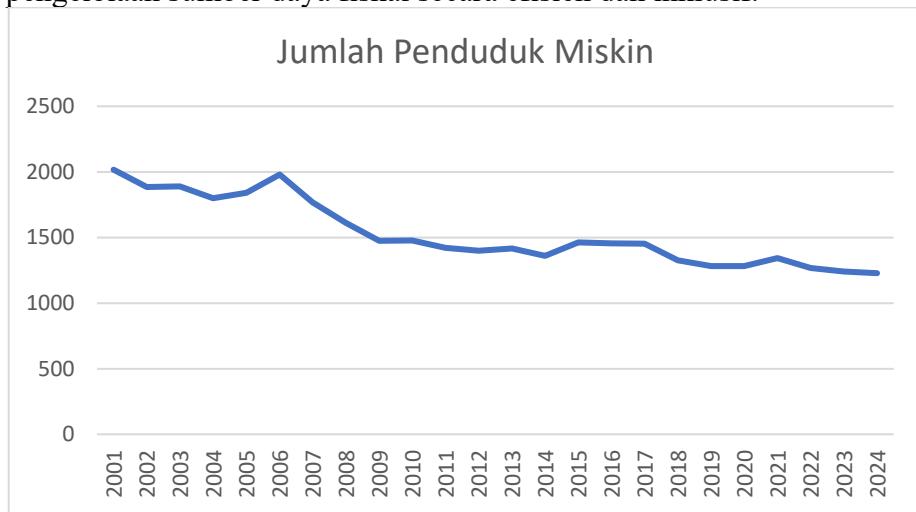
This study analyzes the effect of Regional Gross Domestic Product at Constant Prices (PDRBHK_M), Open Unemployment Rate (TPT), and exchange rate (Kurs) on the number of poor people (JPM) in North Sumatra Province with government revenue as a mediating variable during 2001–2024. The study uses a quantitative approach with path analysis through EViews 13 and secondary data from the North Sumatra Statistics Agency. The results show that PDRBHK_M, TPT, and Kurs do not have a significant effect on government revenue or the number of poor people, and government revenue as a mediator is also insignificant. The direction of the relationship shows that PDRBHK_M tends to reduce poverty, while a weakening of Kurs tends to increase it.

Keywords: GRDP, Open Unemployment Rate, Exchange Rate, Government Revenue, Number of Poor People

A. Pendahuluan

Kemiskinan menjadi isu sosial ekonomi yang kompleks dan masih menjadi hambatan utama dalam upaya pembangunan, terutama di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Masalah ini mencerminkan rendahnya pendapatan serta keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan layak. Todaro dan Smith (2015) menyatakan bahwa kemiskinan bersifat multidimensional karena terkait dengan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Bagi masyarakat miskin, kondisi ini berdampak langsung terhadap kesejahteraan dan menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan wilayah.

Jumlah penduduk miskin mencerminkan langsung tingkat kesejahteraan masyarakat dan menjadi variabel kunci dalam analisis ekonomi daerah. BPS (2024) mengartikan penduduk miskin sebagai individu atau kelompok yang memiliki tingkat pengeluaran lebih rendah dari batas garis kemiskinan. Peningkatan angka kemiskinan menunjukkan lemahnya distribusi hasil pembangunan. Mankiw (2018) menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang timpang dapat meningkatkan risiko kemiskinan. Sementara itu, Musgrave dalam Mardiasmo (2009) menyoroti pentingnya penerimaan daerah dalam fungsi alokasi dan distribusi untuk mengurangi kemiskinan. Pendapatan daerah yang memadai memungkinkan penyediaan bantuan sosial dan infrastruktur dasar. Dengan demikian, hubungan antara kemiskinan dan penerimaan daerah bersifat timbal balik. Todaro dan Smith (2011) juga menegaskan bahwa efektivitas pengentasan kemiskinan bergantung pada pengelolaan sumber daya fiskal secara efisien dan inklusif.



Gambar 1. Grafik Jumlah Penduduk Miskin di SUMUT tahun 2001-2021

Berdasarkan grafik jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara pada periode 2001–2024 menunjukkan kecenderungan menurun meskipun sempat mengalami beberapa kenaikan di tahun-tahun tertentu. Pada tahun 2001, jumlahnya sekitar 1,91 juta jiwa, lalu turun menjadi 1,76 juta jiwa pada 2005 seiring membaiknya kondisi ekonomi daerah. Namun, pada 2006 terjadi sedikit peningkatan menjadi 1,97 juta jiwa akibat harga bahan bakar dan inflasi yang menekan daya beli masyarakat. Setelah itu, angka kemiskinan berangsur menurun hingga mencapai 1,26 juta jiwa pada 2019, menunjukkan perbaikan ekonomi yang stabil. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 sempat meningkatkan

jumlah penduduk miskin menjadi 1,35 juta jiwa, tetapi kondisi kembali membaik hingga mencapai sekitar 1,20 juta jiwa pada 2024. Secara keseluruhan, perkembangan ini memperlihatkan bahwa tingkat kemiskinan di Sumatera Utara terus berkurang dalam jangka panjang sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi dan berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa faktor ekonomi utama yang memengaruhi kemiskinan meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Kurs rupiah. PDRB mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang mampu mendorong penurunan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja (Mankiw, 2018; Todaro & Smith, 2011). Musgrave dalam Mardiasmo (2009) menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi meningkatkan penerimaan pemerintah untuk membiayai program sosial. Penelitian empiris (Sulistian, 2022; Febriaty, 2021) juga menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi salah satu indikator utama yang mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat. Tingginya angka pengangguran berimplikasi pada menurunnya pendapatan dan meningkatnya risiko kemiskinan (Keynes, 1936; Mankiw, 2018; Todaro & Smith, 2011). Menurut Sukirno (2006), ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan turut memperburuk tingkat pengangguran. Temuan empiris dari Sulistiawan (2022) serta Handayani dan rekan-rekan (2021) juga menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Selain itu, fluktuasi kurs rupiah terhadap dolar AS juga memengaruhi kemiskinan, terutama melalui inflasi impor yang menurunkan daya beli masyarakat miskin (Krugman & Obstfeld, 2009; Dornbusch et al., 2011). Sukirno (2016) menjelaskan bahwa ketidakstabilan kurs menurunkan investasi dan penciptaan kerja. Penelitian Putri (2021) serta Suryani dan Hidayat (2020) menunjukkan bahwa depresiasi rupiah berdampak signifikan terhadap peningkatan kemiskinan.

Penerimaan daerah memiliki peran strategis sebagai mekanisme mediasi antara variabel ekonomi dan tingkat kemiskinan. Menurut Musgrave dalam Mardiasmo (2009), penerimaan daerah berfungsi untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pemerataan, serta memperkuat pembangunan. Semakin tinggi penerimaan daerah, maka semakin besar pula kapasitas fiskal pemerintah dalam mengurangi kemiskinan melalui berbagai program sosial dan pembangunan infrastruktur (Rahayu, 2018; Wulandari, 2021). Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, terlihat bahwa masih terdapat dinamika serta ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh PDRB, tingkat pengangguran terbuka, dan nilai tukar terhadap kemiskinan, khususnya ketika penerimaan daerah berperan sebagai variabel mediasi. Oleh sebab itu, peneliti terdorong untuk meneliti kembali hubungan antar variabel tersebut dengan menempatkan penerimaan daerah sebagai variabel mediasi, karena peningkatan penerimaan pemerintah diyakini dapat memperkuat efek pertumbuhan ekonomi serta mengurangi dampak negatif pengangguran dan fluktuasi nilai tukar terhadap kemiskinan. Penelitian ini berfokus pada Provinsi Sumatera Utara selama periode 2001–2024 dengan pertimbangan bahwa daerah ini masih menghadapi ketimpangan ekonomi dan kerentanan sosial

akibat perubahan kondisi makroekonomi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berjudul **“Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Kurs terhadap Jumlah Penduduk Miskin dengan Penerimaan Daerah sebagai Variabel Mediasi di Provinsi Sumatera Utara Periode 2001–2024.”**

Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Sub Struktur 1

H1: PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pemerintah daerah di Sumatera utara Periode 2001–2024.

H2: TPT berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pemerintah daerah di Sumatera Utara periode 2001–2024.

H3: Kurs berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pemerintah daerah di Sumatera Utara periode 2001–2024.

Sub Struktur 2

H4: PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara periode 2001–2024.

H5: TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara periode 2001–2024.

H6: Kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara periode 2001–2024.

H7: Penerimaan pemerintah daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara periode 2001–2024.

Hipotesis Tidak Langsung

H8: PDRB berpengaruh tidak langsung terhadap jumlah penduduk miskin melalui penerimaan pemerintah daerah.

H9: TPT berpengaruh tidak langsung terhadap jumlah penduduk miskin melalui penerimaan pemerintah daerah.

H10: Kurs berpengaruh tidak langsung terhadap jumlah penduduk miskin melalui penerimaan pemerintah daerah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto per kapita (PDRBHK_M), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan nilai tukar (KURS) terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2001–2024, dengan penerimaan pemerintah sebagai variabel mediasi. Data yang digunakan merupakan data sekunder berbentuk deret waktu (time series) tahunan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara.

Analisis data dilakukan menggunakan metode *path analysis* yang diolah melalui program Eviews 13. Pemilihan metode ini didasarkan pada kemampuannya untuk menguji baik pengaruh langsung maupun tidak langsung antarvariabel secara bersamaan. Model penelitian dibagi ke dalam dua sub-struktur, di mana sub-struktur pertama menggambarkan pengaruh variabel independen terhadap variabel mediasi, yaitu penerimaan pemerintah, dengan bentuk persamaan sebagai berikut:

$$Z = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots + \varepsilon \quad (\text{Regresi 1})$$

Dimana Z adalah penerimaan pemerintah, X1 adalah PDRBHK_M, X2 adalah TPT, X3 adalah KURS. Sub-struktural kedua menjelaskan variabel independen dan variabel mediasi terhadap variabel dependen, yaitu jumlah penduduk miskin, dengan persamaan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta Z_1 \dots + \varepsilon \quad (\text{Regresi 2})$$

Dimana Y adalah jumlah penduduk miskin dan Z adalah penerimaan pemerintah sebagai variabel mediasi. Model ini memungkinkan peneliti untuk menilai seberapa besar pengaruh langsung PDRBHK_M, TPT, dan KURS terhadap jumlah penduduk miskin, serta seberapa besar pengaruh tidak langsung melalui penerimaan pemerintah. Sebelum estimasi jalur (path coefficient) dilakukan, dilakukan pengujian asumsi klasik seperti normalitas, multikolinearitas, dan autokorelasi untuk memastikan validitas dan reliabilitas model.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil dan Pembahasan Pertama

Uji Asumsi Klasik

Substruktur 1

Jenis Uji	Metode yang Digunakan	Nilai Hasil Uji	Kesimpulan
Uji normalitas	Jarque Bera Test	Sig = 0.308526	Data berdistribusi normal
Uji Multikolinearitas	Variance Inflation Factor (VIF)	1.007660 (x1); 1.008234 (x2); 1.000978 (x3)	Tidak terjadi multikolinearitas (VIF < 10)
Uji Autokorelasi	Breusch–Godfrey LM Test	0.9359	Tidak terjadi autokorelasi (Sig > 0.05)
Uji Heteroskedastisitas	Breusch PaganGodfrey Test	Sig = 0.8583	Tidak terjadi heteroskedastisitas (Sig > 0.05)

Substruktur 2

Jenis Uji	Metode yang Digunakan	Nilai Hasil Uji	Kesimpulan
Uji Normalitas	Jarque–Bera Test	Sig = 0.914	Data berdistribusi normal

Uji Multikolinearitas	Variance Inflation Factor (VIF)	1.108843 (x1); 1.046206 (x2); 1.014230 (x3); 1.141575 (z)	Tidak terjadi multikolinearitas (VIF < 10)
Uji Autokorelasi	Breusch–Godfrey LM Test	0.5710	Tidak terjadi autokorelasi (Sig > 0.05)
Uji Heteroskedastisitas	Breusch PaganGodfrey Test	Sig = 0.3552	Tidak terjadi heteroskedastisitas (Sig > 0.05)

- Uji normalitas: Berdasarkan tabel di atas dengan kriteria bahwa jika nilai sig > 0,05 artinya di dalam model I dan model II data berdistribusi normal.
- Uji Multikolinearitas: Berdasarkan tabel di atas dengan kriteria bahwa jika nilai VIF < 10 artinya di dalam model I dan model II tidak terdapat multikolinearitas
- Uji normalitas: Berdasarkan tabel di atas dengan kriteria bahwa jika nilai sig > 0,05 artinya di dalam model I dan model II tidak terjadi autokorelasi.
- Uji heteroskedastisitas: Berdasarkan tabel di atas dengan kriteria bahwa jika nilai sig > 0,05 artinya di dalam model I dan model II tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 10
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob (thitung)	Prob (fhitung)	Fhitung
X1 terhadap Z	0.152274	0.110243	1.381256	0.1832	-	-
X2 terhadap Z	0.009145	0.010811	0.845923	0.4081	-	-
X3 terhadap Z	-0.134532	0.268246	-0.501526	0.6218	-	-

X1, X2, X3, terhadap Z	R ² = 0.124	-	-	-	0.461037	0.896642
X1 terhadap Y	-0.030469	0.056785	-0.536566	0.5981	-	-
X2 (TPT) terhadap Y	0.001279	0.005407	-0.236491	0.8157	-	-
X3 (KURS) terhadap Y	0.025605	0.132584	0.193127	0.8490	-	-
Z terhadap Y	0.064177	0.112648	0.569713	0.5759	-	-
X1 X2 X3 Z terhadap Y	R ² = 0,1893	-	-	-	0.9717	0.1243

Sumber: Output Eviews

Berdasarkan tabel analisis regresi berganda dengan menggunakan path analysis, hasil penelitian menghasilkan model persamaan regresi sebagai berikut:

a. Uji Keseluruhan Parameter (F-test)

Pada model 1 diketahui bahwa secara simultan variabel PDRB, TPT, dan Kurs tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pemerintah di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2001–2024. Sementara itu, pada model 2 ditemukan bahwa secara simultan variabel PDRB, TPT, Kurs, dan penerimaan pemerintah Kurs tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan dalam variabel-variabel ekonomi tersebut secara bersama-sama mampu memengaruhi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.

b. Uji Parsial (*t-test*)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa:

- PDRB berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Penerimaan Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara.
- TPT berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Penerimaan Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara.
- Kurs berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Penerimaan Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara.
- PDRB berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Utara.

- e. TPT berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Utara.
- f. Kurs berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Utara.
- g. Penerimaan Pemerintah tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Utara.

c. Uji Koefisien Determinan (R^2)

Pada model 1 diperoleh nilai R^2 sebesar 0,124, yang berarti bahwa variabel PDRB, TPT, dan Kurs mampu menjelaskan variasi penerimaan pemerintah di Provinsi Sumatera Utara sebesar 12,4%, sedangkan sisanya sebesar 87,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Sementara itu, pada model 2 nilai R^2 sebesar 0,189 menunjukkan bahwa variabel PDRB, TPT, Kurs, dan Penerimaan Pemerintah secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebesar 18,9%, dan sisanya 81,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

d. Pembahasan Model Analisis

Hasil Estimasi Model 1

Pada model 1 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$DLOG(Z) = 0.033525 + 0.152274 DLOG(X1) + 0.009145X2 - 0.134532DLOG(X3) + \dots + \epsilon$$

- a. Nilai konstanta sebesar 0.033525 menunjukkan bahwa apabila variabel bebas yaitu PDRB, TPT, dan Kurs bernilai konstan, maka penerimaan pemerintah di Provinsi Sumatera Utara berada pada angka 0.033525 satuan.
- b. Setiap peningkatan PDRB sebesar 1 miliar rupiah akan meningkatkan penerimaan pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar 0.152274 miliar rupiah, dengan asumsi variabel lain tetap.
- c. Setiap kenaikan TPT sebesar 1 persen akan meningkatkan penerimaan pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar 0.00914 persen, menunjukkan bahwa meningkatnya pengangguran berdampak positif terhadap penerimaan fiskal daerah.
- d. Setiap kenaikan Kurs sebesar 1 rupiah akan menurunkan penerimaan pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar 0.134532 rupiah, yang mengindikasikan pelemahan nilai tukar berpotensi menekan pendapatan daerah.

Hasil Estimasi Model 2

Pada model 2 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$DLOG(Y) = -0.016948 - 0.030469DLOG(X1) - 0.001279X2 + 0.025605DLOG(X3) + 0.064177DLOG(Z) + \dots + \epsilon$$

- a. Nilai konstanta sebesar 0.016948 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel bebas (PDRB, TPT, Kurs, dan Penerimaan Pemerintah) konstan, maka jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebesar 0.016948 jiwa.
- b. Setiap peningkatan PDRB sebesar 1 miliar rupiah akan menurunkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebesar 0.030469 jiwa, yang dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi mulai memberikan dampak positif terhadap pengurangan kemiskinan.

- c. Setiap kenaikan TPT sebesar 1 persen akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 0.001279 jiwa, yang mungkin menunjukkan adanya pergeseran struktur ekonomi atau efek kebijakan tertentu dalam periode penelitian.
 - d. Setiap peningkatan Kurs sebesar 1 rupiah akan meningkatkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebesar 0.025605 jiwa, yang berarti depresiasi rupiah berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.
 - e. Setiap kenaikan penerimaan pemerintah sebesar 1 miliar rupiah akan meningkatkan jumlah penduduk miskin sebesar 0.064177 jiwa, yang menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan daerah belum diimbangi dengan efektivitas alokasi anggaran dalam penanggulangan kemiskinan.

PATH ANALYSIS

UJI SOBEL

Tabel Acuan Perhitungan sobel test

Variabel	Coeffecients	Std.Error
PDRBHK_M	0.152	0.110
TPT	0.009	0.010
Kurs	-0.134	0.268
Penerimaan	0.064	0.112

Hasil Calculation For The Sobel test

PDRBHK_M(X1)- Penerimaan(Z)-JPM(Y) TPT (X2)-Penerimaan(Z)-JPM(Y)

X1-Z-Y		Test Statistic	P-Value
a	0.152	0.528	0.597
b	0.064		
Sa	0.110		
Sb	0.112		

X2-Z-Y		Test Statistic	P-Value
a	0.009	0.482	0.629
b	0.064		
Sa	0.010		
Sb	0.112		

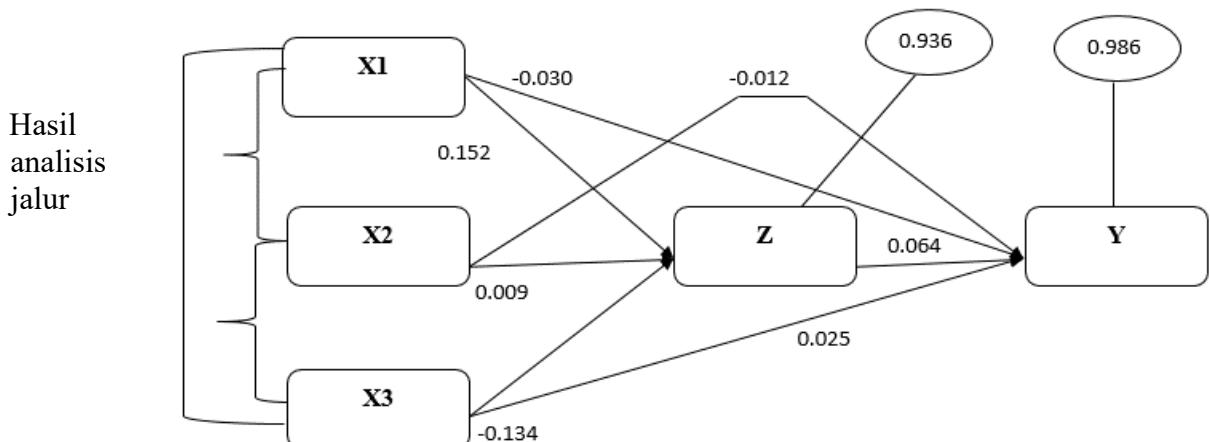
Kurs (X3)-Penerimaan(Z)-JPM(Y)

X3-Z-Y	Test Statistic	P-Value
a	-0.134	
b	0.064	
Sa	0.268	
Sb	0.112	

- 1 Berdasarkan uji sobel tes menggunakan Calculation For The Sobel Test terhadap variabel Penerimaan(Z) sebagai mediasi untuk variabel PDRBHK_M (X1) terhadap IPM (Y) Di Sumatera utara dengan Z hitung $0.528 < Z$ tabel 1.72 dan Sign 0.183 > 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa

variabel Penerimaan (Z) tidak dapat memediasi variabel PDRBHK_M (X1) terhadap variabel JPM (Y).

- 2 Berdasarkan uji sobel tes menggunakan Calculation For The Sobel Test terhadap variabel Penerimaan(Z) sebagai mediasi untuk variabel TPT (X2) terhadap JPM (Y) Di Sumatera utara dengan Z hitung $0.482 < Z$ tabel 1.72 dan Sign $0.408 > 0.05$. maka dapat di simpulkan bahwa variabel Penerimaan (Z) tidak dapat memediasi variabel TPT (X2) terhadap variabel JPM(Y).
- 3 Berdasarkan uji sobel tes menggunakan Calculation For The Sobel Test terhadap variabel Penerimaan(Z) sebagai mediasi untuk variabel Kurs (X3) terhadap JPM (Y) Di Sumatera utara dengan Z hitung $0.376 < Z$ tabel 1.72 dan Sign $0.621 > 0.05$. maka dapat di simpulkan bahwa variabel Penerimaan (Z) tidak dapat memediasi variabel Kurs (X3) terhadap variabel JPM (Y).



menunjukkan bahwa variabel PDRBHK_M (X1) memiliki hubungan positif terhadap penerimaan pemerintah (Z) dan negatif terhadap jumlah penduduk miskin (Y), namun keduanya tidak signifikan. Hal ini berarti bahwa peningkatan PDRBHK_M belum cukup kuat untuk meningkatkan penerimaan pemerintah maupun menurunkan jumlah penduduk miskin secara langsung. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara belum bersifat inklusif dan belum mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT/X2) menunjukkan arah hubungan positif terhadap penerimaan pemerintah (Z) dan negatif terhadap jumlah penduduk miskin (Y), namun pengaruhnya juga tidak signifikan. Artinya, perubahan tingkat pengangguran belum berpengaruh nyata terhadap penerimaan maupun tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Sementara itu, variabel Kurs (X3) menunjukkan pengaruh negatif terhadap penerimaan pemerintah (Z) dan positif terhadap jumlah penduduk miskin (Y), yang berarti pelemahan nilai tukar rupiah cenderung menurunkan penerimaan pemerintah sekaligus meningkatkan jumlah penduduk miskin, meskipun pengaruhnya tidak signifikan. Adapun variabel Penerimaan Pemerintah (Z) sebagai variabel mediasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin (Y), yang menunjukkan bahwa penerimaan pemerintah belum mampu memediasi hubungan antara PDRBHK_M, TPT, dan Kurs terhadap jumlah penduduk miskin. Secara keseluruhan, hasil

penelitian ini mengindikasikan bahwa variabel Kurs (X3) memiliki arah pengaruh paling dominan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara, sedangkan PDRBHK_M, TPT, dan Penerimaan Pemerintah belum memberikan kontribusi nyata dalam menurunkan jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut.

2. Pembahasan

Pengaruh PDRB Terhadap Penerimaan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penerimaan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara. Nilai t-statistic ($1.381 < 1.71$) dan probabilitas ($0.0916 > 0.05$) menunjukkan bahwa kenaikan PDRB belum berdampak nyata pada peningkatan penerimaan daerah periode 2001–2024. Secara teori, peningkatan PDRB seharusnya memperluas basis pajak dan meningkatkan kemampuan fiskal (Musgrave & Musgrave, 1989 dalam Mardiasmo, 2009), tetapi hasil empiris menunjukkan hal sebaliknya. Hal ini diduga disebabkan oleh struktur ekonomi yang masih bergantung pada sektor primer seperti pertanian dan perkebunan dengan kontribusi fiskal rendah, serta efisiensi administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak yang belum optimal. Sejalan dengan temuan Santosa dan Rahmawati (2022), pengaruh PDRB terhadap penerimaan daerah di Indonesia cenderung positif tetapi tidak selalu signifikan, terutama di daerah dengan ekonomi tradisional. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara belum efektif mendorong peningkatan penerimaan daerah, sehingga diperlukan penguatan kelembagaan fiskal dan kebijakan pengelolaan pajak yang lebih optimal.

Pengaruh TPT Terhadap Penerimaan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penerimaan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara. Nilai t-statistic sebesar $0.8459 < 1.71$ dan probabilitas $0.2040 > 0.05$ menunjukkan bahwa perubahan tingkat pengangguran belum berdampak nyata terhadap penerimaan daerah selama periode 2001–2024. Arah hubungan positif menunjukkan bahwa meskipun pengangguran meningkat, penerimaan daerah tidak menurun secara signifikan, kemungkinan karena sebagian penganggur masih aktif di sektor informal yang tetap berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi dan pajak tidak langsung. Selain itu, kebijakan fiskal dan bantuan transfer dari pemerintah pusat turut menjaga stabilitas penerimaan daerah. Secara teori, hasil ini sejalan dengan pendapat Sukirno (2016) dan Boediono (2002) yang menjelaskan bahwa pengangguran tidak selalu berpengaruh langsung terhadap penerimaan fiskal karena peran sektor informal dan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah lebih menentukan. Secara empiris, temuan ini juga didukung oleh penelitian Sari dan Prabowo (2021) yang menemukan pengaruh positif namun tidak signifikan antara pengangguran dan pendapatan daerah. Dengan demikian, stabilitas penerimaan daerah di Sumatera Utara tetap terjaga berkat sektor informal yang kuat dan dukungan fiskal dari pemerintah pusat, meskipun tingkat pengangguran berfluktuasi.

Pengaruh Kurs Terhadap Penerimaan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Kurs berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara. Nilai t-statistic sebesar -0.5015 lebih kecil dari t-tabel 1.71 dengan nilai

probabilitas sebesar $0.3109 > 0.05$, sehingga hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh signifikan ditolak. Artinya, perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tidak memberikan pengaruh nyata terhadap fluktuasi penerimaan pemerintah daerah selama periode 2001–2024. Meskipun arah hubungan negatif menunjukkan bahwa depresiasi rupiah cenderung menurunkan daya beli dan aktivitas ekonomi, dampaknya terhadap penerimaan daerah tidak langsung terasa. Hal ini dapat disebabkan oleh struktur penerimaan daerah yang sebagian besar masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, bukan semata-mata pada aktivitas ekonomi yang dipengaruhi nilai tukar. Secara teoritis, hasil ini sejalan dengan pandangan Mankiw (2018) yang menyatakan bahwa fluktuasi nilai tukar lebih berpengaruh terhadap sektor perdagangan luar negeri dibanding terhadap penerimaan fiskal daerah, terutama di wilayah yang tidak berorientasi ekspor. Boediono (2002) juga menegaskan bahwa pengaruh depresiasi rupiah terhadap penerimaan pemerintah daerah bergantung pada kemampuan daerah dalam mengelola dampak inflasi dan menjaga stabilitas fiskal. Secara empiris, hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Putri dan Nasution (2022) yang menunjukkan bahwa nilai tukar berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah di beberapa provinsi di Indonesia, karena sebagian besar penerimaan fiskal lebih ditentukan oleh kebijakan pusat dan transfer dana alokasi umum (DAU). Dengan demikian, meskipun depresiasi rupiah dapat menekan daya beli dan aktivitas ekonomi, dampaknya terhadap penerimaan pemerintah daerah di Sumatera Utara masih terbatas karena ketergantungan pada transfer fiskal dan belum optimalnya kontribusi sektor ekspor terhadap pendapatan daerah.

Pengaruh PDRB Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Bruto Harga Konstan (PDRBHK_M) memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin (JPM) di Sumatera Utara, dengan nilai t-statistic sebesar $-0.5365 < t\text{-tabel} (1.71)$ dan nilai probabilitas sebesar $0.2990 > 0.05$. Artinya, peningkatan PDRBHK_M tidak secara nyata mampu menurunkan tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Secara teori, hasil ini tidak sejalan dengan pandangan Todaro & Smith (2011) serta Mankiw (2018), yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi seharusnya mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan memperluas kesempatan kerja sehingga mengurangi kemiskinan. Namun, kondisi di Sumatera Utara menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum inklusif, karena manfaat kenaikan output regional lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan PDRB belum cukup mampu menjangkau sektor-sektor padat karya yang menjadi tumpuan masyarakat berpendapatan rendah. Secara empiris, temuan ini didukung oleh penelitian Febraty (2021) dan Sulistiawan (2022), yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di beberapa provinsi Indonesia tidak selalu berdampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan karena tingginya kesenjangan sosial dan lemahnya pemerataan pembangunan. Fenomena ini juga sejalan dengan kurva Kuznets (1955), yang menjelaskan bahwa pada tahap awal pembangunan, pertumbuhan ekonomi justru dapat memperlebar kesenjangan pendapatan sebelum akhirnya berkontribusi pada penurunan kemiskinan dalam

jangka panjang. Dengan demikian, meskipun arah hubungan antara PDRB dan kemiskinan bersifat negatif, lemahnya signifikansi statistik menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara belum cukup merata dan belum mampu memberikan efek langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Pengaruh TPT Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, dengan nilai t-statistic sebesar $-0.2364 < t\text{-tabel}$ (1.71) dan probabilitas sebesar $0.4078 > 0.05$. Artinya, perubahan tingkat pengangguran belum memberikan pengaruh nyata terhadap penurunan kemiskinan di Sumatera Utara. Secara teori, hasil ini tidak sejalan dengan pandangan Sukirno (2016) dan Todaro & Smith (2011), yang menyebutkan bahwa penurunan pengangguran seharusnya berbanding lurus dengan penurunan kemiskinan karena meningkatnya akses terhadap pendapatan dan konsumsi. Secara empiris, temuan ini sesuai dengan penelitian Sari dan Rachmawati (2020) yang menemukan bahwa pengangguran di beberapa provinsi di Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan karena sebagian besar penganggur adalah kelompok usia muda dan terdidik yang masih bergantung pada keluarga. Kondisi serupa juga terjadi di Sumatera Utara, di mana sebagian tenaga kerja masih terserap dalam sektor informal berpendapatan rendah, sehingga perubahan tingkat pengangguran belum cukup mencerminkan peningkatan kesejahteraan. Dengan demikian, arah hubungan negatif namun tidak signifikan menunjukkan bahwa pengurangan pengangguran belum sepenuhnya berdampak pada penurunan kemiskinan karena kualitas dan produktivitas pekerjaan masih rendah.

Pengaruh Kurs Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel nilai tukar rupiah (Kurs) memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, dengan nilai t-statistic sebesar $0.1931 < t\text{-tabel}$ (1.71) dan probabilitas sebesar $0.09655 > 0.05$. Hal ini berarti pelemahan nilai tukar rupiah belum memberikan pengaruh nyata terhadap peningkatan kemiskinan di Sumatera Utara. Secara teori, hasil ini bertolak belakang dengan pandangan Dornbusch dan Fischer (2014), yang menyatakan bahwa depresiasi nilai tukar biasanya berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat miskin karena meningkatkan harga barang impor dan inflasi domestik. Secara empiris, hasil ini sejalan dengan penelitian Lestari (2021) dan Nugroho (2022), yang menemukan bahwa fluktuasi kurs hanya berdampak signifikan terhadap kemiskinan apabila disertai lonjakan inflasi yang tinggi. Di Sumatera Utara, stabilitas harga dan kebijakan fiskal pemerintah daerah cenderung mampu menahan dampak depresiasi kurs terhadap daya beli masyarakat. Dengan demikian, hubungan positif namun tidak signifikan ini menunjukkan bahwa perubahan kurs belum menjadi faktor dominan dalam memengaruhi tingkat kemiskinan karena struktur ekonomi daerah lebih bergantung pada sektor domestik daripada impor.

Pengaruh Penerimaan Pemerintah Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel penerimaan pemerintah memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara, dengan nilai t-statistic sebesar $0.5697 < t\text{-tabel}$ (1.71) dan

probabilitas sebesar $0.2879 > 0.05$. Artinya, meskipun penerimaan pemerintah meningkat, hal tersebut belum secara signifikan menurunkan jumlah penduduk miskin. Secara teori, hal ini tidak sepenuhnya sesuai dengan pandangan Musgrave dalam Mardiasmo (2009), yang menyatakan bahwa meningkatnya penerimaan pemerintah seharusnya memperkuat kapasitas fiskal untuk menjalankan program-program sosial dan pembangunan ekonomi yang pro-rakyat. Secara empiris, hasil ini sejalan dengan penelitian Yuliani (2020) dan Setyawan (2023), yang menyebutkan bahwa peningkatan penerimaan pemerintah daerah seringkali belum efektif dalam menekan kemiskinan karena sebagian besar dialokasikan untuk belanja rutin dan birokrasi, bukan pada program produktif. Di Sumatera Utara, peningkatan pendapatan daerah belum sepenuhnya diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat miskin, sehingga dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan masih terbatas. Dengan demikian, meskipun arah hubungan menunjukkan kecenderungan positif, lemahnya signifikansi membuktikan bahwa efektivitas kebijakan fiskal daerah masih perlu diperkuat agar mampu memberikan manfaat nyata bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Pengaruh Tidak Langsung PDRB terhadap Jumlah Penduduk Miskin melalui Penerimaan Pemerintah

Berdasarkan hasil uji Sobel, variabel penerimaan pemerintah daerah tidak mampu memediasi hubungan antara PDRBHK_M dan jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara. Nilai Z hitung sebesar $0,528 < 1,72$ dengan tingkat signifikansi $0,597 > 0,05$, menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung antara PDRBHK_M terhadap kemiskinan melalui penerimaan pemerintah tidak signifikan. Artinya, peningkatan PDRBHK_M belum mampu meningkatkan penerimaan pemerintah secara signifikan, dan pada gilirannya belum berdampak nyata terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin. Secara teoritis, hasil ini menunjukkan bahwa peran fiskal daerah sebagai transmisi pertumbuhan ekonomi menuju kesejahteraan masyarakat masih lemah. Musgrave (1989) dan Mardiasmo (2009) menegaskan bahwa fungsi distribusi dan stabilisasi dari penerimaan pemerintah menjadi kunci dalam menyalurkan manfaat pertumbuhan ekonomi bagi kelompok berpendapatan rendah. Namun, di Sumatera Utara, hasil ini menandakan adanya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan kebijakan fiskal, di mana peningkatan output ekonomi tidak secara otomatis memperluas ruang fiskal untuk program penanggulangan kemiskinan. Temuan ini juga menunjukkan bahwa struktur penerimaan pemerintah di Sumatera Utara masih belum cukup sensitif terhadap perubahan PDRBHK_M, mungkin karena sebagian besar penerimaan bersumber dari dana transfer pusat, bukan dari pajak daerah yang bergantung pada aktivitas ekonomi lokal. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi daerah tidak secara langsung memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Santosa & Rahmawati (2022) yang menemukan bahwa efek mediasi penerimaan daerah antara PDRB dan kemiskinan di Indonesia relatif lemah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun arah hubungan antara PDRBHK_M dan penerimaan pemerintah bersifat positif, efek transmisinya terhadap penurunan kemiskinan melalui jalur fiskal tidak signifikan. Hal ini menegaskan perlunya peningkatan kapasitas fiskal daerah agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat lebih efektif dialirkkan kepada masyarakat miskin

melalui kebijakan pengeluaran publik yang tepat sasaran. Pengaruh Tidak Langsung Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Jumlah Penduduk Miskin melalui Penerimaan Pemerintah.

Pengaruh Tidak Langsung Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Jumlah Penduduk Miskin melalui Penerimaan Pemerintah

Hasil uji Sobel menunjukkan bahwa penerimaan pemerintah tidak memediasi hubungan antara tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara. Nilai Z hitung sebesar $0,482 < 1,72$ dengan signifikansi $0,629 > 0,05$, menandakan bahwa pengaruh tidak langsung TPT terhadap kemiskinan melalui penerimaan pemerintah daerah tidak signifikan. Artinya, meskipun pengangguran cenderung menurunkan penerimaan pemerintah dan berpotensi meningkatkan kemiskinan, mekanisme hubungan tersebut tidak cukup kuat secara statistik untuk menunjukkan adanya efek mediasi. Secara teoritis, hasil ini tidak sejalan dengan kerangka Keynes (1936) yang menyatakan bahwa meningkatnya pengangguran akan menekan pendapatan agregat dan mengurangi penerimaan pemerintah, yang pada akhirnya memperburuk kemiskinan. Menurut Sukirno (2006), kondisi pasar tenaga kerja yang lemah menghambat aktivitas ekonomi produktif, yang berdampak pada menurunnya penerimaan pajak daerah. Namun, temuan empiris yang tidak signifikan ini dapat dijelaskan oleh sifat struktur ekonomi Sumatera Utara yang masih ditopang oleh sektor informal, sehingga fluktuasi pengangguran tidak secara langsung memengaruhi basis pajak atau penerimaan pemerintah. Selain itu, ketidakefektifan mediasi penerimaan pemerintah juga mencerminkan peran fiskal yang belum maksimal dalam menyalurkan efek lapangan kerja terhadap kesejahteraan masyarakat. Musgrave (1989) menekankan bahwa penerimaan daerah berfungsi sebagai alat stabilisasi dan redistribusi pendapatan untuk menjaga keseimbangan sosial. Namun, apabila penerimaan daerah tidak diarahkan pada penciptaan lapangan kerja produktif, maka penurunan pengangguran tidak akan diikuti oleh pengurangan kemiskinan secara signifikan. Dengan demikian, ketidaksignifikansi efek mediasi ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal di Sumatera Utara belum cukup adaptif dalam menanggapi dinamika pasar tenaga kerja. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Ningrum (2017) dan Handayani dkk. (2021), yang menemukan bahwa hubungan antara pengangguran, penerimaan fiskal, dan kemiskinan di Indonesia cenderung lemah karena sebagian besar penerimaan daerah tidak berasal dari sektor tenaga kerja, melainkan dari pajak konsumsi dan dana transfer. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pemerintah tidak berperan sebagai variabel mediasi antara TPT dan kemiskinan, karena mekanisme fiskal di Sumatera Utara belum cukup responsif terhadap perubahan kondisi pengangguran.

Pengaruh Tidak Langsung Kurs terhadap Jumlah Penduduk Miskin melalui Penerimaan Pemerintah

Berdasarkan hasil uji Sobel, penerimaan pemerintah daerah tidak mampu memediasi pengaruh kurs terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara. Nilai Z hitung sebesar $0,376 < 1,72$ dengan tingkat signifikansi $0,706 > 0,05$, menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung antara kurs dan kemiskinan melalui penerimaan pemerintah tidak signifikan. Artinya, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS memang cenderung meningkatkan jumlah penduduk miskin

secara langsung, namun peningkatan atau penurunan penerimaan pemerintah tidak menjadi jalur transmisi yang signifikan dalam hubungan tersebut. Secara teori, hasil ini tidak sesuai dengan pandangan Krugman dan Obstfeld (2009) serta Musgrave (1989), yang menyatakan bahwa fluktuasi kurs dapat memengaruhi keseimbangan fiskal pemerintah melalui perubahan dalam pajak perdagangan internasional seperti bea masuk, PPN impor, atau penerimaan ekspor. Dalam kondisi ideal, depresiasi kurs seharusnya dapat meningkatkan penerimaan pemerintah melalui kenaikan pajak ekspor atau impor. Namun, hasil empiris menunjukkan bahwa di Sumatera Utara, pelemahan nilai tukar justru lebih banyak menekan sektor ekonomi domestik, sehingga penerimaan fiskal tidak meningkat secara signifikan dan tidak mampu menahan dampak negatif depresiasi terhadap kemiskinan. Temuan ini menggambarkan asimetrisnya hubungan antara variabel makroekonomi dan kebijakan fiskal daerah, di mana perubahan kurs berdampak lebih kuat pada biaya hidup dan daya beli masyarakat daripada pada kapasitas fiskal pemerintah daerah. Ketika kurs melemah, harga barang impor dan kebutuhan pokok meningkat, sementara potensi penerimaan dari aktivitas perdagangan menurun karena konsumsi masyarakat berkurang. Akibatnya, penerimaan pemerintah tidak mengalami peningkatan berarti dan tidak mampu berfungsi sebagai mekanisme stabilisasi untuk melindungi masyarakat miskin dari tekanan inflasi impor. Penelitian ini mendukung temuan Yuliani (2020) dan Sari & Lubis (2021), yang menyatakan bahwa depresiasi rupiah cenderung meningkatkan kemiskinan tanpa diimbangi oleh peningkatan penerimaan pemerintah yang signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pemerintah daerah tidak berperan sebagai variabel mediasi antara kurs dan kemiskinan, karena pelemahan nilai tukar lebih banyak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat miskin dibandingkan pada peningkatan kapasitas fiskal pemerintah daerah.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa variabel PDRBHK_M, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Kurs tidak berpengaruh signifikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara. Penerimaan pemerintah sebagai variabel mediasi juga belum mampu memperkuat hubungan antarvariabel tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara belum bersifat inklusif dan kebijakan fiskal daerah belum berjalan efektif dalam menekan angka kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Dunia. (2000). *World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty*. Washington, DC: The World Bank.
- Boediono. (2002). *Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE.
- Dornbusch, R., Fischer, S., & Startz, R. (2011). *Macroeconomics* (12th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Febriaty, H. (2021). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 21(1), 77–89.
- Handayani, S., Rachmawati, T., & Fadhilah, M. (2021). Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(2), 112–120.
- Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money*. London: Macmillan.
- Krugman, P. R., & Obstfeld, M. (2009). *International Economics: Theory and Policy* (8th ed.). Boston: Pearson Education.
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kuncoro, M. (2010). *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Kusriyawanto, B. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(3), 221–230.
- Kuznets, S. (1955). Economic Growth and Income Inequality. *The American Economic Review*, 45(1), 1–28.
- Mankiw, N. G. (2018). *Principles of Economics* (8th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice* (5th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Permata, N. (2012). Analisis Pengaruh Faktor Produksi terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 3(2), 45–57.
- Putri, R. A. (2021). Pengaruh Kurs Rupiah terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 10(1), 33–42.
- Rahayu, D. (2018). Penerimaan Daerah dan Pengaruhnya terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Daerah*, 7(2), 65–78.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2004). *Economics* (18th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. New York: Oxford University Press.
- Sharp, A. M., Register, C. A., & Grimes, P. W. (2003). *Economics of Social Issues*. Boston: McGraw-Hill.
- Sukirno, S. (2006). *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Sukirno, S. (2016). Makroekonomi Teori Pengantar (Edisi ke-5). Jakarta: Rajawali Pers.
- Sulistiani, I. (2022). Pengaruh PDRB dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Regional*, 10(1), 51–63.
- Suryani, T., & Hidayat, R. (2020). Volatilitas Kurs dan Dampaknya terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 14(2), 101–114.
- Stiglitz, J. E. (2000). *Economics of the Public Sector* (3rd ed.). New York: W.W. Norton & Company.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Economic Development* (11th ed.). Boston: Pearson Addison-Wesley.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Pembangunan Ekonomi* (Edisi 12). Jakarta: Erlangga.
- Wulandari, R. (2021). Pengaruh Penerimaan Daerah terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Daerah*, 9(3), 210–223.